

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, 2011. Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Ali Achmad Chomzah, 2004, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Hukum Pendaftaran Tanah dan e-PPAT-an, Prestasi Puskarya, Jakarta.
- Ali Affandi, 2000. Hukum Hukum Waris Hukum Keluarga Pembuktian, Jakarta. Rineka Cipta.
- A.P. Parlindungan, 1999, Pendaftaran Tanah Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta. Agusssalim Andi Gadjong, 2007, Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum, Bogor Ghlmia Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.
- Budi Untung, 2015, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil, 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_, 2009, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Djaja S. Maliala, 2014, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Cetakan Pertama, Bandung.
- G.H.S Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris/PPAT, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2020, Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen, 2007, General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta. , 2006, Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung.

- Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2020, Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kencana, Jakarta.
- Herlien Soerojo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya.
- Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), 1997, Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kongres I IPPAT di Bandung. Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Sinar Harapan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD dan SF. Marbun, 1987, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta,.
- N.K. Denzlim dan Y.S. Lincoln, 1994, Handbook of Qualitative Research, Sage Publications, Thousand Oaks.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dkk, 2001, Penegakan Hukum Administrasi Indonesia Introduction To The Indonesian Administrative Law, Cetakan ke-7, Gadjah Mada Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- R.Subekti, 2014. Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. , 2005, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo, 1992. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Cet ke25, Jakarta. Pradnya Paramita.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada 140
- Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta. , 2014, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim HS, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, Teknik Pembuatan Akta PPAT, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Setiawan, 1995, Hak Ingkar dari Notaris/PPAT dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta. Shidarta, 2006,

- Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Refika Aditama, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta. , 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Sutedi, 2006. Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 2000, Metodologi Riset, Andi, Yogyakarta. Teer Haar, 1994, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta. Pradaya Paramita.
- Urip Santoso, 2016, Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta), Prenadamedia Group, Jakarta.
- Vita Peni Maryuningrum, 2005, Efektifitas Hibah Atas Tanah Menurut Hukum Adat Dalam Pendaftaran Tanah, Surakarta. Universitas Sebelas Maret,
- Yuliandri, 2010, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuslim, 2014, Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang.

## **B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANG**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Jap. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 58/PDT/2019/PT JAP. Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021.

## **C. SUMBER LAINNYA**

- Ahmad Rivoni, 2022, “Pendaftaran Tanah Berdasarkan Alas Hak Hibah di Bawah Tangan Pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi”, Tesis, Universitas Andalas, Padang. Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <https://hukum.kompasiana.com>.

- Eka Febriyana, 2021, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli yang Tidak Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Sleman”,  
Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. I Gusti Bagus Yoga Prawira, 2016, “Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah”, Jurnal IUS, Volume 4, Nomor 1.
- Ketut Suriawan dan Ni Ny. Mariadi, Proses Peralihan Hak atas Tanah dalam Bentuk Akta Hibah, Jurnal Hukum, Vol.5, No.2 Desember 2017.
- Purwaning Rahayu Sisworini, Abdul Majid, dan Herman Suryokumoro, 2020, “Penerapan Honorarium PPAT Sebagai Upaya Untuk Penyetaraan Pelayanan (Studi Kasus di Kota Malang)”, Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 8, Nomor 3.
- R. Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2.
- Umul Sa’adah, 2022, “Analisis Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Akta Hibah yang Dibuat oleh PPAT Tanpa Dihadiri oleh Salah Satu Pihak: Studi Kasus Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.PBR”, Tesis, Universitas Andalas, Padang.

